

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Kontrak Tertunda, Anggaran Rumah Susun Dipangkas Rp 332,6 Miliar

Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp 800 miliar untuk rumah DP nol rupiah.

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengusulkan pemangkas dana pembangunan dan revitalisasi rumah susun sewa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi rumah susun dikurangi Rp 332,6 miliar dari pagu awal menjadi Rp 599,9 miliar.

“Kami usulkan dikurangi karena harus menyesuaikan dengan sisa waktunya,” ujar Kelik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, kemarin.

Dinas Perumahan tahun ini merencanakan pembangunan tujuh rumah susun, merevitalisasi dua rumah susun, serta membangun sarana dan prasarana di rumah susun. Proyek tahun jamak itu telah diakomodasi dalam APBD 2019

**“Target kami menyentuh masyarakat (bawah) karena kepadatan penduduk di DKI sudah luar biasa.”**

**Prasetyo Edi Marsudi**  
Ketua Badan Anggaran

Anggaran pagu anggaran Rp 932,57 miliar.

Kelik menjelaskan, Dinas awalnya menargetkan meneken kontrak dengan pemenang lelang proyek rumah susun itu pada pertengahan tahun ini. Ternyata, target itu tak tercapai. “Jadinya (tekan kontrak pekerjaan) Oktober nanti,” ucapnya.

Akibatnya, Kelik melanjutkan, Dinas harus menggeser rencana dengan menargetkan pekerjaan pada tahun ini sebesar 15 persen dan di tahun depan 85 persen. Awalnya, pembangunan dan revitalisasi rumah susun itu ditargetkan 40 persen pada tahun ini dan 60 persen di tahun depan.

Kelik mengklaim tak tercapainya target pembangunan dan revitalisasi rumah susun itu tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan hunian sewa tersebut. Sebab, pembangunan dan revitalisasi rumah susun itu tetap ditargetkan rampung pada tahun depan. “Jadi, selesainya bukan tahun ini, melainkan tahun depan,” ujarnya.

Kepala Badan Pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengungkapkan target kontrak pembangunan dan revitalisasi rumah susun tak tercapainya karena Dinas Perumahan belum menetapkan bobot teknis dan biaya dalam proyek tersebut. Saat itu, Dinas masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini menyebutkan pembagian antara bobot teknis dan biaya ialah 30 persen berbanding 70 persen.

Masalahnya, menurut Blessmiyanda, peraturan terbaru, yakni Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bobot teknis sebesar 70 persen dan bobot biaya 30 persen. “Perpres barunya bilang begitu, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus menyesuaikannya,” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran, Pantas Nainggolan, mempertanyakan pengurangan anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi rumah susun sewa itu. Menurut dia, Dinas

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Kontrak Tertunda, Anggaran Rumah Susun Dipangkas Rp 332,6 Miliar

seharusnya memprioritaskan program tersebut agar segera selesai karena masih banyak masyarakat Jakarta yang membutuhkan rumah susun sewa. "Kenapa anggaran justru dikurangi di sektor yang penting?" ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Pemerintah DKI justru menambah anggaran melalui penyertaan modal bagi PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 800 miliar. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk pengadaan lahan hunian program rumah tanpa uang muka atau *down payment* (DP) nol rupiah. Program yang belakangan namanya berubah menjadi Solusi Rumah Warga (Samawa) itu merupakan janji kampanye

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Pantas, seharusnya program DP nol rupiah tidak dikerjakan perusahaan daerah. Alasannya, program itu juga disubsidi pemerintah DKI. "Ini malah rencananya anggarannya ditambahkan untuk pengadaan lahan," ucapnya.

Ketua Badan Anggaran, Prasetyo Edi Marsudi, berpesan agar program rumah DP nol rupiah nantinya benar-benar ditujukan bagi warga DKI yang tidak mampu. "Target kami menyentuh masyarakat (bawah) karena kepadatan penduduk di DKI sudah luar biasa," kata politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua DPRD DKI itu. ●

### Rancangan Perubahan Anggaran

Usul perubahan APBD 2019 yang masih dalam bentuk rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS)

#### Pendapatan (triliun)



#### Belanja (triliun)



#### Pembiayaan (triliun)



#### Keterangan (triliun)



Penetapan APBD 2019      Rancangan KUPA-PPAS      Selisih

#### Keterangan:

Hingga berita ini ditulis, pembahasan rancangan KUPA-PPAS 2019 masih berlangsung.

SUMBER: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA